

Ikhtisar Webinar

Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan



Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan

24 Oktober 2022 | 14.00 – 16.30 WIB

Webinar Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan dibuka oleh Makmur Keliat, Penasihat Senior LAB 45. Webinar ini menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi RI sebagai *keynote speaker* yang mengawali *webinar* ini. Selanjutnya, *webinar* ini menghadirkan empat pembicara yakni: (1) Berly Martawardaya, Direktur Studi INDEF; (2) Ekha Yudha Pratama, Kepala Divisi Konsultasi PT SMI; (3) Qatro Romandhi, Plt. Koordinator PPKE Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI; (4) Indah Lestari, Tim Kolaborasi Riset LAB 45 dan CSIS; serta dimoderatori oleh Novia Xu, Analis Departemen Ekonomi CSIS.

Makmur Keliat memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa ekonomi hijau menjadi pilar penting bagi pembangunan nasional di masa depan, di mana diperlukan pembangunan ekonomi rendah karbon, efisiensi sumber daya, serta inklusif secara sosial. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi hijau diperlukan dorongan dari peningkatan investasi swasta maupun publik. Terlebih, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki biodiversitas terbesar di dunia dan menjadi negara dengan rentang hutan terluas ketiga di dunia. Kekayaan-kekayaan tersebut akan hilang jika Indonesia tidak berkomitmen dengan ekonomi hijau, terlebih kini masif ditengarai oleh isu perubahan iklim. Untuk itu, penelitian ini hadir sebagai salah satu upaya menuangkan gagasan besar dalam mendukung implementasi ekonomi hijau. Hasil kajian merangkai benang merah dari evaluasi implementasi, tantangan, hingga rekomendasi strategi guna mendorong proses transisi ekonomi hijau Indonesia 2045.

Sebagai pemapar kunci, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bagaimana Indonesia, bahkan global, masih dihadapkan isu pandemi yang belum usai; ditambah dengan bayang-bayang krisis ekonomi dunia dan ketidakpastian global. Meskipun demikian, Indonesia masih mampu untuk bernavigasi menghadapi permasalahan tersebut. Pengendalian yang baik oleh pemerintah terlihat dari kemampuan Indonesia dalam menorehkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5 persen. Beberapa strategi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat

pertumbuhan ekonomi nasional di antaranya: (1) Indonesia harus mampu mengendalikan proses pemulihan, baik dari pandemi maupun potensi ancaman lain di masa depan, (2) mendorong transformasi struktural menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah tinggi dan berdampak pada perekonomian secara inklusif; (3) pengupayaan digitalisasi; (4) penguatan ketahanan ekonomi melalui program *bottom-up approach*; serta (5) mengeksekusi kebijakan *low carbon economy* melalui dekarbonisasi dan transisi energi yang terukur. Dalam hal kebijakan *low carbon economy*, Luhut menilai bahwa diperlukan upaya inisiatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Komitmen ini telah diumumkan Indonesia dalam target NDC sebesar 43,2%. Elektrifikasi industri dipandang menjadi salah satu kunci, seperti kebijakan kendaraan listrik dan kebijakan ekonomi sirkular, sehingga diharapkan beban subsidi energi akan semakin tereliminasi secara gradual. Selain itu, kebijakan pasar karbon juga dipersiapkan pemerintah mengingat Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Terakhir, Luhut menekankan implementasi ekonomi hijau memegang prinsip *affordability, reliability, dan timely* dalam pengimplementasiannya sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

Qatro Romandhi memaparkan bagaimana pemerintah sudah cukup banyak merilis dokumen terkait ekonomi hijau dari tahun 2015-2022. Sejauh ini, sudah terdapat tujuh dokumen yang membahas upaya untuk mencapai NDC 2030, sektor energi pada *net zero emission*, hingga outlook transisi energi Indonesia. Menilik jenisnya, bauran energi primer Indonesia masih didominasi oleh energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas. Melihat permintaan energi fosil yang masih cukup tinggi, Qatro menilai bahwa transisi energi dapat dirampungkan dengan menyinergikan sisi permintaan dan penawaran. Atensi lebih dibutuhkan pada sisi penawaran mengingat dampaknya jika tidak terpenuhinya permintaan akan berujung pada peningkatan impor perdagangan dan berefek pada defisit neraca perdagangan. Maka dari itu, diperlukan utilisasi sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan dan impor BBM, yang dalam hal ini energi terbarukan menjadi salah satu solusi. Beberapa strategi implementasi harus dirampungkan seperti: (1) pemberhentian aktivitas PLTU Batubara; (2) percepatan pengembangan EBT, terutama PLTS dan PLTB; (3) efisiensi penggunaan teknologi yang menargetkan di kedua sisi; serta (4) promosi penggunaan

kendaraan listrik dan kompor induksi. Per tahun 2021, konsumsi energi final terjadi sebesar 849 juta SBM. Sebarannya paling banyak dilakukan oleh sektor transportasi (46%) dan sektor industri (31%). Masifnya penggunaan energi fosil bagi kedua sektor tersebut, Qatro menilai bahwa kebijakan transisi energi membutuhkan waktu yang cukup lama yang ditargetkan berkisar dari tahun 2030 hingga 2060.

Pada sektor industri, terdapat beberapa kebijakan seperti peningkatan penggunaan listrik dan pengurangan batubara dan gas; efisiensi energi; strategi elektrifikasi; pemanfaatan *green hydrogen*; substitusi biomassa; dan *carbon capture & storage* (CCS) untuk sektor semen dan baja dari tahun 2036. Sedangkan sektor transportasi dapat ditekankan pada pemberhentian impor BBM; pemanfaatan *biofuel*; penetrasi kendaraan listrik; penggunaan hidrogen untuk truk; pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan (*eco-fuels*); *e-fuel* untuk kendaraan; *electric vessels*; serta efisiensi teknologi yang diproyeksikan 20-25% pada tahun 2060. Bergeser pada sektor lain seperti rumah tangga dan komersial, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga memproyeksikan kebijakan lain seperti pemberhentian impor LPG, mendorong penetrasi pada penggunaan kompor induksi, pemanfaatan jaringan gas, dan program efisiensi energi termasuk optimalisasi manajemen energi, Standar Kinerja Energi Minimum (MEPS), dan penggunaan *high energy efficient appliances*. Terlebih, Perpres No. 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, komitmen transisi energi sektor ketenagalistrikan dilakukan dalam dua poin utama melalui penyusunan peta jalan pengakhiran PLTU dan pelarangan PLTU.

Eka Yudha Pratama selanjutnya memaparkan bagaimana PT SMI merupakan sebuah BUMN yang berfokus pada proyek infrastruktur, utamanya kelistrikan. Sebagai lembaga pembiayaan non-perbankan, PT SMI memiliki tiga pilar bisnis yakni pembiayaan dan investasi; *project preparation*, dan jasa konsultasi. PT SMI dalam peranan mendukung keuangan berkelanjutan turut mengakomodasi proyek hijau di Indonesia seperti pembiayaan berkelanjutan melalui proyek RE dan adaptasi iklim; mendorong kemitraan dalam pembiayaan hijau bersama AFD dan GCF, mendukung fungsi pembangunan melalui proyek Indonesia *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) untuk membantu *developer geothermal* dalam melakukan tahap eksplorasi;

serta mendorong pembiayaan energi hijau melalui proyek *Environmental Social and Safeguard* dan *SDGs Indonesia One*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan proyek agar dapat lebih banyak proyek yang dirampungkan. Pada tahun 2018, PT SMI menerbitkan *green bond* untuk mengupayakan sektor energi terbarukan dan transportasi bersih, yang mana sektor energi terbarukan dilakukan melalui proyek *mini hydro*, dan transportasi bersih melalui pendanaan pembangunan LRT.

Eka melihat bahwa isu utama transisi energi Indonesia mengacu pada pertumbuhan ekonomi hijau dan *decommissioning*. Saat ini terdapat kondisi *oversupply* ketenagalistrikan di mana pertumbuhan permintaan tenaga listrik tidak sebanding dengan permintaan kemampuan penyediaan tenaga listrik. Hal ini turut menjadi tugas tersendiri bagi PT SMI untuk dapat menyediakan solusi yang membantu PLN dalam mendorong transisi energi, dengan di sisi lain mempertimbangkan kesehatan keuangan PLN. Terdapat tiga skema yang dilakukan PT SMI dalam mendukung transisi energi Indonesia yakni *result based loan*, *assets divestment*, dan *equity investment*. Dengan program *result based loan* melalui *blended finance* dari dana fiskal dan dana multilateral, diharapkan PLN dapat mendukung upaya pengurangan PLTU dan meningkatkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Sementara itu, upaya *assets divestment* dan *equity investment* dilakukan untuk mengurangi umur ekonomi dari aset PLTU. Secara khusus, PT SMI mendukung Dana Pengurangan Karbon dalam upaya menghapus PLTU berbasis Batubara, dan mendukung pembangunan energi terbarukan melalui platform Dana Energi Bersih

Sementara itu, Berly Martawardaya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang di Asia menurun hingga 4,4% pada tahun 2021, dari pertumbuhan sebelumnya sebesar 7,2% pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari krisis energi yang dihadapi banyak negara di dunia. Pertumbuhan hijau sebagai hal yang digaung-gaungkan nyatanya tidak hanya berdampak pada segi lingkungan seperti capaian NZE belaka, namun juga dari segi ekonomi. Pengembangan ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% hingga tahun 2060, mengurangi emisi GRK hingga 96 miliar ton, mendongkrak pendapatan nasional bruto hingga 34% pada tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta pekerjaan hijau

pada tahun 2030 di sektor energi, kendaraan listrik, serta sektor restorasi lahan dan air. Berly juga melihat bahwa ekonomi hijau menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat sudah cukup banyak alarm bencana yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan upaya dalam mengurangi krisis iklim melalui mitigasi dan adaptasi iklim. Menilik lebih dalam terkait jenis emisi, mayoritas emisi Indonesia cukup banyak didorong oleh komoditas energi dan malfungsi FOLU. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan yang menjawab sumber emisi tersebut untuk suksesti ekonomi hijau. Berbagai tantangan dalam implementasi pertumbuhan hijau ditemukan seperti masih rendahnya proporsi pendanaan oleh sektor publik dan sektor keuangan; masih maraknya alih fungsi lahan hutan; masih tingginya pembangkit berbasis batu bara; rendahnya kesadaran publik di mana pertumbuhan hijau maish belum menjadi prioritas. Di sisi lain, terdapat peluang dan opsi untuk pertumbuhan hijau di Indonesia dengan menerapkan proteksi dan pembatasan alih fungsi lahan; regulasi dan kebijakan hijau, pembiayaan dan investasi hijau; bisnis hijau; transportasi dan energi hijau; serta kesadaran hijau oleh masyarakat.

Indah Lestari mengemukakan bagaimana riset ingin melihat kesinambungan komponen lingkungan berkelanjutan yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam lingkup ekonomi hijau. Studi ini diawali dengan melihat posisi perkembangan ekonomi hijau Indonesia tiga sudut pandang, yakni dari kaca mata internasional, nasional, dan daerah. Ketiga pandangan tersebut menyimpulkan bahwa saat ini implementasi ekonomi hijau Indonesia masih bersifat transaksional antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Selanjutnya, Indah mengulas faktor pengungkit pertama, yakni regulasi, bahwa ditemukan 114 regulasi terkait ekonomi hijau, di mana didominasi oleh Peraturan Menteri yang masih hanya berfokus pada sektor energi dan ekstraktif serta sektor manufaktur. Jika menilik dari segi efektivitas dan afirmasi kebijakan ekonomi hijau, terdapat beberapa insentif fiskal seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Namun, dikhawatirkan insentif-insentif tersebut tidak dapat memberikan dampak signifikan dalam transformasi pangsa pasar yang ada. Selanjutnya dari sisi kelembagaan, studi menyusun model proses bisnis ekonomi hijau dari proses perencanaan hingga pengawasan, di mana dari model ini ditemukan bahwa Bappenas dan KLHK menjadi dua K/L yang berperan paling besar. Dari segi

instansi yang memprakarsai regulasi, ditemukan tiga instansi yang paling banyak mengeluarkan regulasi seperti KESDM, KLHK, dan Kemenperin. Sedangkan, KPUPR, Kemenhub, dan Kemenperin menjadi tiga K/L yang paling banyak berkontribusi pada anggaran untuk program perubahan iklim. Terakhir, dari faktor pendanaan, studi masih menemukan kurangnya pendanaan untuk mencapai target NDC 2030. Dalam hal ini, dibutuhkan pendanaan alternatif yang lebih optimis dalam mendorong pendanaan ekonomi hijau dan anggaran iklim. Hasil penelusuran studi juga mencuplik ekosistem pendanaan ekonomi hijau yang dilakukan oleh PT SMI dalam implementasi *SDG Indonesia One*.

Studi kemudian memetakan berbagai tantangan yang ditemukan dalam regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan lainnya. Tantangan tersebut mengacu pada keabsenan regulasi dalam hal peningkatan daya tawar sektor ekonomi hijau secara komprehensif, dinamika ketidakpastian payung hukum dalam aktivitas ekonomi hijau, praktik ekonomi hijau yang masih terpusat pada beberapa K/L saja, minimnya kanal yang menjembatani interaksi pemerintah dan pemangku kepentingan, alokasi pendanaan ekonomi hijau yang masih bersaing dengan isu ekonomi lainnya, keterbatasan transparansi proses *monitoring* dan evaluasi pendanaan hijau, hingga tantangan geografis dan pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, riset ini menuliskan berbagai rekomendasi strategi pengembangan ekonomi hijau yang dilayangkan kepada pemerintah, baik rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selanjutnya, studi juga memetakan skenario perencanaan ekonomi hijau yang ingin berfokus pada efektivitas regulasi dan kelembagaan, serta optimalisasi pendanaan. Pada tahun 2022, studi masih melihat jika posisi Indonesia akan ekonomi hijau masih belum ideal, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun pendanaan. Tahun 2024 diharapkan sudah menunjukkan pergeseran kuadran yang lebih baik melalui payung hukum yang lebih pasti serta pendanaan yang efisien. Sedangkan, tahun 2030 hingga tahun 2045 diharapkan dapat merujuk pada posisi ekonomi hijau yang ideal dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian visi ekonomi hijau 2045.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Apakah terdapat tantangan tersendiri untuk mencapai target NZE, utamanya dari institusi atau kelembagaan? Apakah terdapat satu institusi yang dapat dijadikan acuan untuk pengupayaan ekonomi hijau?

Qatro Romandhi: Masing-masing K/L memiliki peran teritorialnya tersendiri. Peran serta K/L sangat ditunggu mengingat unit instansi dari masing-masing sektor berbeda. Dalam hal ini, dibutuhkan koordinasi dengan K/L lain dalam suksepsi peta jalan yang secara inklusif menggandeng seluruh institusi. Selaku pemerintah, KESDM masih dalam tahap menyusun regulasi, yang dalam hal ini tentunya akan memerlukan dukungan dari Pemda, swasta, akademisi, atau lembaga *think-tank*.

Pertanyaan: Melihat potensi resesi global dewasa ini, apakah terdapat perubahan sentimen terhadap pendanaan hijau?

Ekha Yudha Pratama: Sejauh ini belum terdapat perubahan sentimen terhadap pendanaan hijau, terlihat dari bagaimana lembaga-lembaga multilateral aktif dalam membantu pengupayaan pendanaan ekonomi hijau, seperti ADB dan aliansi-aliansi lainnya. Namun terdapat hal yang dikhawatirkan terkait harga yang ditawarkan dalam pendanaan hijau, mengingat komoditas pendanaan tersebut akan mahal sejalan dengan datangnya resesi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PT SMI terkait cara *blended finance* dapat menyediakan pembiayaan yang murah. Selain itu, terdapat hal lain yang dirasa perlu dicermati secara global yakni terkait dengan *transition taxonomy*, mengingat sejauh ini masih belum terdapat kejelasan terkait metodologi *coal decommissioning*. Namun, dukungan global terkait pendanaan hijau sudah dirasakan, seperti sudah banyak dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pertanyaan: Bagaimana koordinasi pusat dan daerah dijalankan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau di tingkat nasional, utamanya dalam lingkup desentralisasi?

Berly Martawardaya: Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya melambat; tidak terjerumus dalam lembah resesi. Terkait koordinasi, harus terdapat koordinasi dari pusat untuk membagi tugas kepada daerah, di mana target nasional dipecah menjadi target provinsi dan daerah. Manajemen otonomi turut perlu diubah, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional tetapi turut berimplikasi pada pertumbuhan hijau. Dalam hal ini, ekonomi daerah turut memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi ekonomi hijau di Indonesia. Selain itu, kebutuhan ulasan performa secara rutin secara output seperti emisi dan proporsi sektor terbarukan dengan regulasi oleh Peraturan Daerah, setidaknya satu tahun sekali. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah yang memiliki performa baik dapat memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) yang lebih banyak sehingga memacu semangat setiap daerah.

Pertanyaan: Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan rantai peran ekonomi hijau dari pelaku-pelaku lainnya, baik dari swasta, CSO, pelaku usaha industri mikro, dan masyarakat?

Indah Lestari: Pemerintah memegang peran vital bagi pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia. Namun, peran tersebut perlu didampingi oleh dialog antar pemangku kepentingan diiringi regulasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam dialog tersebut, dapat dilakukan pemetaan peran bagi para pemangku kepentingan, contohnya pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung sektor ekonomi hijau seperti ekowisata. Selanjutnya, perlu menghadirkan regulasi yang bersifat partisipatif dan mampu menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong transparansi dan kepercayaan dari berbagai para pelaku.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Senin, 24 Oktober
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id